

## Gagasan

**2** Strategi Implementasi UU KIP

## Wacana

**4** Humas: Garda Depan Pelayanan Informasi Publik

## Event

**5** Riset Kolaborasi Peneliti Indonesia-Australia

# BUMN dan Kebanggaan Bangsa



Menteri BUMN Mustafa Abubakar saat bertemu Pemimpin Umum Kompas Jakob Oetama, Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun dan Jajaran Redaksi Kompas

“Di bawah kepemimpinan Bapak, Kami melihat sinyal positif posisi BUMN ke depan akan lebih baik” demikian dikatakan Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun usai mendengar penjelasan Menteri BUMN Mustafa Abubakar saat kunjungan ke Kompas, Senin (1/2).

Dalam pemaparannya, Mustafa Abubakar menjelaskan beban berat warisan citra buram BUMN masa lalu yang masih melekat. BUMN, kata Mustafa, masih identik dengan pemborosan, perusahaan yang tidak efisien dan inovatif, dan kerap menjadi sapi perah kelompok tertentu. Namun, berkat kerja keras dan upaya yang dilakukan Kementerian BUMN serta komitmen semua pihak warisan citra buram tersebut lambat laun mulai terkikis. Dalam kunjungan ke Harian Kompas ini, Menteri BUMN didampingi beberapa pejabat Kementerian BUMN antara lain : Abdul Aziz, Ekoputro Adijayanto, Gatot Trihargo, Mahmud Husen, dan Konsultan Komunikasi Heri Rakhmadi (Bamboedoea Communications),

Dalam sepuluh tahun terakhir, lanjut Mustafa, posisi dan kinerja BUMN sudah lebih baik. Tahun 2010 laba semua BUMN

ditargetkan Rp 92,7 triliun. Ini lebih tinggi dari realisasi laba 2009, yaitu Rp 74,28 triliun. Adapun belanja modal 2010 diproyeksikan Rp 190,8 triliun, tahun 2009 hanya Rp 107 triliun. “Tahun ini, kami menargetkan jumlah BUMN yang merugi hanya delapan,” ujar Mustafa.

Salah satu program yang menjadi prioritas tahun ini adalah realisasi revitalisasi pabrik gula. Menurut Mustafa, program ini bakal berjalan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Alasannya, tahun ini ada konsistensi kebijakan tata niaga gula impor dan kepastian hukum bagi perusahaan BUMN untuk berinvestasi.

Program peningkatan mental profesionalisme di semua BUMN juga terus dibangun. Untuk itu, implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) seperti transparansi dan akuntabilitas di tingkat kementerian maupun BUMN sendiri terus dikedepankan. Dengan kinerja yang semakin profesional, posisi BUMN sebagai sokoguru perekonomian nasional yang menjadi instrumen negara yang berperan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat akan

bertambah kuat.

Ke depan, menurut Mustafa, tugas berat yang diembannya adalah mendorong agar BUMN dapat menjadi kebanggaan bangsa. Hal ini merupakan tantangan tersendiri, meski sebenarnya sudah banyak produk-produk BUMN yang cukup membanggakan dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa. “Contohnya PT Dirgantara Indonesia yang memperoleh kepercayaan dari Republik Korea untuk membuat pesawat kepresidenan mereka. Selain itu, beberapa negara lain seperti Uni Emirat Arab, Pakistan, Malaysia, Thailand, Venezuela, Filipina dan Brunei Darussalam juga memesan pesawat dari PT Dirgantara Indonesia,” tutur Mustafa.

Yang tidak kalah pentingnya adalah program kerja sama antar BUMN. Untuk itulah, kata Mustafa, *tagline* Kementerian BUMN di bawah kepemimpinannya adalah sinergi antar BUMN. Menurut Mustafa sinergi antar BUMN merupakan hal yang wajib dan perlu dilakukan mengingat luasnya cakupan dan sektor bisnis yang digeluti masing-masing BUMN. Dari mulai sektor pertanian sampai industri strategis atau dari urusan transportasi hingga jasa keuangan. Dengan potensi sektor bisnis yang demikian luas, maka hal yang perlu dilakukan Kementerian BUMN adalah membangun sinergi antar BUMN agar tambah kuat.

Selain Rikard Bagun, kunjungan Menteri BUMN ke Kompas juga dihadiri oleh jajaran manajemen redaksi lainnya seperti Trias Kuncahyono, Andi Surudji, dan Pieter P. Gero. Pendiri sekaligus Pemimpin Umum Kompas, Jakob Oetama juga berkesempatan hadir.

Pada kesempatan tersebut, Jakob mengatakan BUMN merupakan suatu bentuk perwujudan ekonomi negara yang saling mengisi dengan ekonomi pasar. “Konsep ini merupakan jalan tengah dari apa yang dicita-citakan para pendiri (*founding fathers*) negeri ini,” tutur Jakob.



Heri Rakhmadi

### Selamat Datang Era Transparansi Jilid II

Membuka tahun 2010, sebuah era baru akan dimulai. Setelah pada 1999 kran kebebasan pers di buka, pada tahun ini (tepatnya 30 April 2010) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) akan diberlakukan. Hadirnya UU KIP memang sudah menjadi keharusan di tengah derasnya arus tuntutan transparansi di segala bidang.

Keterbukaan informasi publik menjadi prasyarat terciptanya pemerintahan yang transparan. Lewat asupan informasi dari lembaga-lembaga penyelenggara negara, masyarakat bisa memberikan kontribusi dan partisipasinya dalam setiap kebijakan publik sehingga interaksi dan kerjasama antarkeduanya bisa terjalin baik. Tanpa informasi, publik akan kesulitan untuk berpartisipasi, memberi saran, dan melontarkan kritik membangun terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan lembaga-lembaga negara. Jika hal ini terjadi maka cita-cita terwujudnya *good governance* akan sulit tercapai.

Namun, yang menjadi persoalan besar saat ini adalah, sejauh mana objek utama UU ini—Badan Publik (BP)—sudah mempersiapkan dirinya melayani kebutuhan informasi publik? Sudah sejauh mana BP menerapkan kaidah-kaidah transparansi dalam setiap kebijakan dan kegiatannya?

Survei kecil-kecilan yang dilaksanakan ISAI sepanjang 2008 secara umum membuktikan banyak BP belum siap. Yang memperhatikan, ketidaksiapan BP bukan hanya ditemukan di daerah, tetapi juga di Pusat. Padahal, jika UU KIP diberlakukan tidak ada alasan bagi BP untuk tidak melayani permintaan informasi yang memang menjadi milik publik. Sanksi pidana menanti, jika BP tidak menjalankan amanat yang ada di UU KIP.

Untuk itu, saat ini ada baiknya BP mengevaluasi sejauh mana lembaganya sudah mempersiapkan diri menciptakan sistem pelayanan informasi dan komunikasi yang baik, efisien, cepat, tepat, dan mudah diakses oleh publik.

Tidak hanya BP, masyarakat juga harus menyiapkan diri menggunakan berbagai informasi publik sebagai amunisi untuk terlibat aktif dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Mudah-mudahan tahun 2010 menjadi optimisme baru bahwa *good governance* adalah sebuah keniscayaan.

# Strategi Implementasi UU KIP

*Pada Mei 2010 nanti, UU KIP akan diimplementasikan. Langkah mendesak apa yang harus diambil oleh Badan Publik dalam menyongsong pemberlakuan UU KIP?*

Tinggal hitungan bulan, Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diterapkan, tetapi hingga saat ini berbagai tantangan masih menaungi banyak Badan Publik (BP) dalam mengimplementasikan UU KIP. Harus diakui, saat ini tingkat *awareness* dan pemahaman terhadap UU KIP di BP masih rendah. “Kepedulian yang minim inilah yang menjadi akar masalah penerapan UU KIP dan harus segera dicabut,” ujar Direktur Utama Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi.

Menurut Heri, tantangan lain yang juga menjadi kondisi umum di banyak BP adalah belum adanya mekanisme penyimpanan dan pengelolaan data dan informasi atau kearsipan sehingga mengakibatkan belum terbangunnya sistem data base informasi. Minimnya infrastruktur pendukung ditambah minimnya pengetahuan tentang signifikansi data dan informasi dianggap sebagai sebab belum ada *data base* yang baik di hampir semua BP. Semua ketiadaan ini berimbas kepada pelayanan informasi kepada publik yang jauh dari optimal.

“Ini baru tantangan internal. Masih ada tantangan eksternal, seperti jenis permintaan informasi dan pihak peminta informasi yang akan semakin beragam dan variatif, tuntutan hukum

dan sanksi pidana jika BP tidak menyediakan informasi serta kebebasan pers,” ujar Heri.

Tantangan yang begitu kompleks ini perlu segera diurai. Mengingat tenggat penerapan UU KIP tidak lama lagi maka dibutuhkan strategi yang implementatif, sederhana, dan bersifat operasional. Untuk tantangan internal, Heri mengatakan, pimpinan BP harus segera membuat regulasi yang menjadi penunjang kelancaran penerapan UU KIP di lembaganya. Dengan regulasi ini, penerapan UU KIP akan mendapat dukungan semua pihak dan penerapan UU KIP menjadi tanggung jawab semua elemen di BP tersebut. Selain itu, sosialisasi UU KIP di tataran internal harus diintensifkan lewat berbagai kegiatan.

Kegiatan yang paling sederhana dilakukan Badan Publik untuk mengurai tantangan eksternal sebelum UU KIP diberlakukan adalah mulai memetakan pihak-pihak yang akan meminta informasi kepada BP (*stakeholder mapping*) dan menganalisis serta membuat simulasi kebutuhan informasi yang akan dicari masyarakat pada masing-masing BP. Kebebasan pers harus dijadikan peluang bagi BP untuk menjadikan media massa sebagai penyebar informasi publik ke masyarakat luas. “Pers yang sudah menjadi pilar



Call center salah satu metode pelayanan informasi publik

keempat demokrasi harus dijadikan mitra sejajar oleh BP,” ujar Heri.

Saat ini BP harus sudah mengambil langkah-langkah persiapan implementasi UU KIP. Mengingat, hanya kurang dari 100 hari kerja lagi UU KIP akan berlaku maka harus segera diambil langkah taktis dan strategis sehingga sebelum Mei 2010 BP sudah bisa memberikan pelayanan informasi yang baik kepada publik. Ada dua jenis persiapan implementatif yang harus dilakukan BP yaitu persiapan jangka pendek (kurang dari 100 hari kerja) dan persiapan jangka panjang.

## Strategi Jangka Pendek

Menurut Heri, persiapan utama yang dilakukan dalam kurun kurang dari 100 hari ini adalah: mensosialisasikan keberadaan UU KIP dikalangan internal BP; penyiapan organisasi (Minimal Pokja/satuan kerja); menyusun sistem dan prosedur pengumpulan, pengelolaan data dan informasi; sistem dan prosedur pelayanan data dan informasi; dan pembiayaan mengakses informasi (biaya foto copi, penelusuran data dsb).

Sesuai Bab VI UU KIP, prinsip dasar memperoleh informasi adalah cepat, tepat waktu dan biaya ringan serta permintaan diajukan dengan permintaan tertulis atau tidak tertulis. Permintaan informasi ini harus mendapat jawaban dari BP paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan. “Namun, BP dapat memperpanjang waktu untuk memberikan pemberitahuan/jawaban paling lambat tujuh hari kerja dengan memberikan alasan tertulis,” jelas Heri

Yang juga tidak kalah penting di persiapan dalam kurang dari 100 hari ini adalah penyiapan SDM personil organisasi dan penyiapan infrastruktur (komputer dan jaringan internet, data, website, dan data base; dan ruang pelayanan informasi publik), dan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan publik.

Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan, BP juga harus mulai melakukan

berbagai persiapan jangka panjang sebagai upaya optimal yang harus terus menerus dilakukan BP untuk memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada publik

## Strategi Jangka Panjang

Langkah pertama adalah pembentukan organisasi atau satuan kerja khusus Pelayanan Informasi Publik (SK dari pimpinan BP yang bersangkutan) yang jenjang/jalur birokrasi pengelolaan dan pelayanan informasinya sederhana, cepat, dan tepat. Misalnya Badan Informasi Publik, Pusat Informasi dan Komunikasi, Media Center atau sebutan lainnya. Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat, sederhana, mudah dijangkau, dan berbiaya ringan, penguatan dan pengembangan infrastruktur perlu dilakukan secara terus menerus. “Infrastruktur yang memadai menjadi modal utama bagi BP untuk bisa menjalankan amanat UU KIP. Persiapan infrastruktur inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa UU KIP berlaku dua tahun setelah disahkan,” ungkap Heri.

Selanjutnya, penguatan sistem pengelolaan dan pelayanan informasi dengan menciptakan mekanisme di mana publik dapat mengakses sendiri data atau informasi yang dicari adalah salah satu strategi pelayanan informasi yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Website adalah media yang

paling tepat untuk mewujudkannya. Kapan dan di mana saja, publik dapat mencari data atau informasi tanpa harus mendatangi BP. Selain website, penggunaan *e-services* dan *email center* akan mempermudah Badan Publik dalam manajemen dan memberi pelayanan data/informasi dan masyarakat dalam mengakses informasi. Penggunaan *e-services* adalah segala pelayanan data dan informasi dalam bentuk elektronik seperti CD data, pelayanan permintaan data *online*, dan sebagainya.

Infrastruktur yang memadai tanpa didukung oleh sumber daya yang mumpuni akan sia-sia. UU KIP menginginkan terciptanya sumber daya pengelola dan pelayanan informasi publik yang profesional di semua BP dengan di dukung infrastuktur yang baik juga. “Yang harus diperhatikan, penguatan kapasitas harus dilakukan secara berkelanjutan karena perkembangan informasi dan komunikasi sangat dinamis,” ujar Heri.

Berbagai pelatihan dapat menjadi salah satu metode untuk penguatan kapasitas, yaitu antara lain: workshop mendalam tentang UU KIP; pelatihan peningkatan kompetensi dan manajerial pelayanan informasi publik; pelatihan manajemen pengumpulan, klasifikasi, dan pengelolaan data dan informasi publik; dan pelatihan tentang pelayanan informasi publik yang prima (*services excellent*).



# Humas: Garda Depan Pelayanan Informasi Publik



Salah satu amanat Undang-Undang No. 14 / 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah pembentukan sebuah badan baru dalam badan publik untuk mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik. Namun, sebenarnya saat ini fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi sudah mulai di laksanakan beberapa humas badan publik (BP) walaupun belum begitu optimal. Oleh karena itu Humas BP harus berupaya meningkatkan kapasitasnya agar bisa melaksanakan pelayanan informasi publik yang di amanatkan UU KIP.

Direktur Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi mengatakan, harus ada gerakan revitalisasi Humas Pemerintah karena melaksanakan kewajiban yang diamanatkan UU KIP bukanlah pekerjaan yang mudah. "Walaupun bukan pekerjaan mudah, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan publik, Humas pada Badan Publik harus menjadi garda depan pelayanan informasi kepada publik," ujar Heri.

Humas Badan Publik, lanjut Heri, harus berani mengambil tantangan pelayanan informasi yang diamanatkan UU KIP untuk meningkatkan kapasitasnya. Dengan telah tersedianya landasan hukum, metode, tata cara dan mekanisme tentang informasi publik, sebenarnya UU ini telah memberikan bingkai prosedur kerja bagi Humas Badan Publik.

Menurut Kepala BPHN yang juga Ketua Interdept RUU KIP Ahmad M. Ramli, upaya revitalisasi peranan kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang mendesak saat ini sehingga wajib dilaksanakan di semua instansi pemerintah sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peranan kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif.

momentum bagi humas Pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. Informasi yang disampaikan bila tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak informatif, dan tidak membunsi," ujar Ramli.

Wakil Ketua Komisi Informasi Henny S. Widyaningsih memaparkan peran yang harus dimainkan Humas BP dalam mengimplementasikan UU KIP adalah membuat sistem

layanan informasi yang mudah dipahami, cepat, dan sederhana sehingga mendukung pelayanan informasi bagi publik untuk segala lapisan masyarakat.

Selain itu, Humas BP harus menjadi motor ketersediaan informasi publik dan mengemasnya secara sederhana, serta mempublikasikan klasifikasi informasi publik yang ada di lembaganya termasuk informasi yang dikecualikan. "Jika posisi Humas diberikan otoritas sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) maka pemahaman staf humas mengenai isi Undang-Undang KIP adalah mutlak," ujar Henny.

Menurut Henny, Humas BP-lah yang harus mempublikasikan secara rutin dan terkini berbagai informasi publik serta memastikan publik mendapatkan akses informasi secara cepat, akurat, dan mudah dipahami.

Peran penting Humas BP lainnya adalah membantu pejabat publik dalam memberi pertimbangan mengenai uji konsekuensi untuk menetapkan informasi yang dikecualikan dengan mengedepankan prinsip akses maksimum pengecualian terbatas.

Untuk itu, Humas juga harus mendorong terbangunnya berbagai infrastruktur pendukung pengelolaan dan pelayanan informasi yang prima di lembaganya.

Yang sangat mendesak segera dilakukan adalah mensosialisasikan keberadaan UU KIP di kalangan internal BP. Selain itu, saat ini BP harus segera membuat organisasi sederhana (minimal pokja) yang bertugas melakukan pengumpulan dan pengelolaan data/Informasi, pemutakhiran website, penyusunan sistem, mekanisme, alur pengelolaan dan pelayanan informasi, penyiapan SDM personal organisasi, serta menyiapkan infrastruktur.

Humas harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan informasi publik. Sudah saatnya merevitalisasi paradigma Humas dari pengontrol informasi menjadi paradigma pelayanan informasi publik *maximum access limited exemption*, yakni memberikan informasi sebanyak-banyaknya dengan pengecualian yang terbatas. Karena UU KIP mengamanatkan Badan Publik harus melayani semua permohonan informasi, sepanjang bukan informasi yang dikecualikan.



## Riset Kolaborasi Peneliti Indonesia-Australia

Dalam upaya mensosialisasikan hasil penelitian proyek penelitian yang di-*launching* 8 Desember 2009 pada PRF (Policy Research Forum), AIGRP (Australia Indonesia Governance Research Partnership) menggandeng Bamboedoea Communication melakukan serangkaian diskusi media dengan format informal. Diskusi tersebut bertujuan mempresentasikan dan mempublikasikan hasil-hasil

penelitian kolaboratif yang melibatkan peneliti dari Indonesia dan Australia secara detail dan komprehensif kepada para wartawan.

Dari 10 hasil penelitian, lima topik dijadikan tema diskusi media. Kelima topik tersebut adalah: "Menuju Rekam Medis yang *Sharable* dan *Longitudinal* berbasis standar Australia *openEHR* untuk mendukung *E-Health* di Indonesia" yang diadakan pada 1 Desember 2009 dengan menghadirkan Prof Tati Mengko, Dr. G.A. Putri Saptawati dan Dr. Fahmi Idris sebagai narasumber.

Pada tanggal 5 Desember 2009 diskusi media kedua digelar dengan mengambil topik "Partai Lokal di Aceh" menghadirkan Prof. Mawardi Ismail dan Dr. Ben Hillman sebagai narasumber. Sedangkan pada 7 Desember 2009, dua topik sekaligus dijadikan tema diskusi, yaitu "Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah" dan "Reformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia". Dan terakhir pada 9 Desember 2009 diskusi media digelar satu hari setelah PRF 2009 dengan topik Perubahan Iklim dan Dampaknya untuk Petani Padi Berlahan Sempit di Indonesia". Total pemberitaan dari rangkaian diskusi media ini adalah 50 berita/artikel dari 27 media massa.



Peneliti Indonesia-Australia sedang memberikan keterangan kepada wartawan

## Dialog Nasional Perubahan Iklim

Sebagai pemanasan sebelum Delegasi RI berunding di forum Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, Denmark, UNDP Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggelar Peluncuran National Communication (Natcom II) dan Dialog Nasional tentang Perubahan Iklim di Hotel Borobudur, Jakarta (23/11)

Kegiatan ini dihadiri oleh Menneg LH Gusti Muhammad Hatta; Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan; Ketua Harian DNPI Rachmat Witoelar; Country Director UNDP Indonesia Håkan Björkman; Menteri Lingkungan dan Pembangunan Internasional Norwegia Erik Solheim; perwakilan Menko Perekonomian, Menko Kesra, Menteri Keuangan, Menteri Energi Sumberdaya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri, LSM, serta *stakeholder* lain.

Untuk mengkomunikasikan kegiatan ini dan isu-isu didalamnya, Bamboedoea dipercaya UNDP untuk mengelola komunikasi media dan *talk show* perubahan iklim.

Walaupun pada saat itu perhatian media tersedot kepada kasus KPK (Bibit-Chandra), tetapi dengan intensitas informasi yang cukup tinggi kepada para jurnalis, pemberitaan tentang peluncuran Natcom II

dan Dialog Nasional Perubahan Iklim mendapat ekposur media yang cukup tinggi.

Dari monitoring yang dilakukan Litbang Bamboedoea terdapat pemberitaan sebanyak 48 berita dari 32 media massa. Untuk media massa cetak total pemberitaan mengenai kegiatan ini sebanyak 15 berita/artikel; 25 berita untuk media *online*; disiarkan di lima stasiun radio; dan tayangan *running text* dan program khusus di stasiun TV. Total jurnalis yang meliput kegiatan ini sebanyak 46 orang dari 44 media massa. Dengan koordinasi dan kerjasama dengan KLH dan UNDP, konferensi pers dan *talk show* yang dipandu oleh Tina Talissa ini berjalan lancar.



Konferensi pers peluncuran NATCOM II dan Dialog Nasional Perubahan Iklim

## Sosialisasi Massif Musrenbangnas

Kementerian Negara PPN/Bappenas kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Event akbar bertajuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2010-2014 ini akan menentukan wajah pembangunan nasional 5 tahun ke depan. Acara yang dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Para Menteri KIB II, Ketua DPR, Ketua DPD, Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia dan Pimpinan Lembaga Negara ini berlangsung selama tiga hari di Hall D1 Pekan Raya Jakarta (11-12/09) dan di Hotel Bumi Karsa, Kompleks Bidakara, Jakarta (12-13/12/09).

Untuk mengelola publikasi informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2010-2014, Bamboedoea kembali dipercaya oleh Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk menangani publikasi kegiatan ini. Beberapa kegiatan publikasi yang dikelola Bamboedoea antara lain, siaran langsung Pembukaan Musrenbangnas oleh Presiden RI yang disiarkan oleh *Metro TV* (11/12). Lewat pendekatan Bamboedoea, persiapan dan pembukaan Musrenbangnas ini juga disiarkan langsung oleh *TVRI* (11/12). Selain menyiarkan langsung pembukaan, pada hari kedua, *TVRI* juga menayangkan langsung dialog antara wakil presiden dengan seluruh gubernur dan bupati/walikota (12/12). Liputan mengenai Musrenbangnas juga mendapat ulasan khusus dari *TVRI* dalam berbagai program berita *TVRI*.

Bamboedoea juga mengelola publikasi informasi pra pelaksanaan Musrenbangnas yaitu dua kali *live talk show* Musrenbangnas di acara *The Interview (Metro TV)* dengan menghadirkan nara sumber Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana (8/12) dan Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

Syahrial Loetan (9/12).

Publikasi informasi juga dilakukan lewat berbagai iklan Musrenbangnas di berbagai media cetak antara lain: *Kompas*,

*Seputar Indonesia, Jurnal Nasional, Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Sinar Harapan, Pikiran Rakyat, Media Indonesia, dan Koran Tempo.*

Untuk publikasi informasi di radio, ditayangkan iklan tentang kegiatan Musrenbangnas di radio *El Shinta* pada tanggal 10 dan 11 desember 2009, masing-masing dua *spot* di *prime time*. Sementara itu, untuk mengupdate perkembangan pelaksanaan Musrenbangnas juga ditayangkan *running text* di *Metro TV* sebanyak 30 *spot*.

Agar publikasi musrenbangnas dapat sampai dan dilihat langsung para *stakeholder*, Bamboedoea juga membuat publikasi media luar ruang yaitu poster (disebar ke berbagai kementerian/LN), spanduk (dipasang di tempat berlangsungnya acara dan di titik-titik strategis), dan baliho (Kantor Bappenas).

Tim Bamboedoea juga meliput semua aktivitas Musrenbangnas. Hasil liputan disajikan dalam bentuk tulisan dan uraian yang dirangkum dalam dua edisi *newsletter* Kabar Musrenbangnas. *Newsletter* ini kemudian disebarluaskan kepada peserta Musrenbangnas dan publik sehingga masyarakat luas dapat mengetahui proses dan hasil Musrenbangnas.



Presiden SBY membuka Musrenbangnas

30 April 2010 Awal Era Keterbukaan Informasi Publik:

## Badan Publik Harus Segera Siapkan Diri



Peserta & narasumber seminar berfoto bersama

Walau tinggal di Lampung, tidak menghalangi Hendro Kusomo dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Kementerian Pekerjaan Umum Bandar Lampung mengikuti Workshop Strategi Kehumasan Menyambut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang berlangsung di Jakarta, 19 November 2009 lalu. Baginya, informasi mengenai strategi penerapan UU KIP sangat penting diketahui, terlebih lagi, Hendro bekerja di sebuah Badan Publik (BP) yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Tidak hanya Hendro, sebanyak 40 orang Humas dari berbagai BP juga terlihat antusias mengikuti workshop yang membahas

langkah-langkah strategis yang harus dilakukan BP agar bisa menerapkan UU KIP yang akan berlaku 30 April 2010.

Mengingat hanya dalam hitungan bulan UU KIP diterapkan, Bamboedoea berinisiatif menggelar sebuah workshop sehari tentang strategi Humas Badan Publik untuk menerapkan UU KIP. Sebagai Konsultan PR yang telah lebih dari sepuluh tahun berpengalaman mengelola Media Center berbagai event nasional dan beberapa Pusat Informasi dan Komunikasi di kementerian/lembaga negara, Bamboedoea merasa perlu mengadakan sebuah forum evaluasi tentang sejauh mana BP telah mempersiapkan diri menerapkan UU KIP.

Tema-tema penting yang dibicarakan pada workshop ini antara lain: UU KIP dan Semangat *Good Governance*; Peran Komisi Informasi dalam Mengawal UU KIP; Manajemen Sistem Pelayanan Informasi Publik; dan Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Informasi.

Dengan menghadirkan para nara sumber yang kompeten di bidangnya, para peserta tidak hanya disuguhkan penerapan UU KIP

dalam bingkai wacana, tetapi langsung pada tataran operasional.

Untuk mengetahui semangat yang terkandung dalam UU KIP dan kaitannya dengan *good governance*, workshop menghadirkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Prof. Dr. Ahmad M. Ramli. Sedangkan, untuk mengetahui seluk beluk dan tupoksi Komisi Informasi (KI) dan mekanisme penyelesaian sengketa publik dihadirkan Wakil Ketua KI Henny S. Widyaningih.

Pemaparan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana strategi BP agar mampu mempersiapkan diri menerapkan UU KIP secara optimal dalam sisa waktu beberapa bulan sebelum diberlakukan. Materi ini disampaikan oleh Direktur Utama Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi.

Dalam paparannya, Heri mengatakan, dalam kurun waktu kurang dari 100 hari kerja, BP harus segera melakukan persiapan-persiapan implementasi UU KIP bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

# Inspirasi

**Pimpinan Redaksi:** Heri Rakhmadi

**Penulis:** Amir, Oddi Arma, Nurul Agustina, Marta Naomi

**Sekretaris Redaksi:** Nurul Titi Marie, **Grafis:** Wahyu, Fajri, Budi Rama

**Alamat:** Jl. Cakra Wijaya II Blok J No. 10 Kav. Diskum Jakarta Timur - 13420

Telp. +62 21 8591 2743 - 44, Fax. +62 21 856 0408

<http://www.bamboedoea.com>, e-mail: [bamboedoea@bamboedoea.com](mailto:bamboedoea@bamboedoea.com)